ABSTRAK

Perkembangan teknologi memunculkan fenomena periklanan biro jasa yang menawarkan layanan pendirian badan usaha melalui kerja sama dengan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi etis dari praktik tersebut serta efektivitas pengawasannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah praktik periklanan biro jasa pendirian badan usaha yang bekerja sama dengan Notaris ditinjau dari Kode Etik Notaris, serta efektivitas pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD) dan Dewan Kehormatan Daerah Notaris (DKD) terhadap praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal yang menggunakan pendekatan sosio-legal yang bersifat evaluatif untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum positif dan realitas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini menciptakan problematika yuridis karena Notaris selaku pejabat umum tunduk pada mekanisme pihak ketiga. Dalam beberapa iklan, terdapat janji dari biro jasa mengenai pengerjaan waktu tertentu dalam pendirian badan usaha. Janji kecepatan pengerjaan dari biro jasa ini dapat diduga sebagai bentuk promosi kinerja Notaris secara terselubung. Keterlibatan Notaris dalam skema ini secara substansial melanggar larangan kerja sama perantara dan memanfaatkan celah larangan beriklan dalam Kode Etik Notaris. Selain itu hal ini juga berpotensi mengesampingkan independensi, prinsip kehati-hatian, serta prosedur formil UUJN seperti penandatanganan akta di luar wilayah kerja. Pengawasan terhadap praktik ini baik dari MPD maupun DKD pun masih belum optimal akibat celah aturan mengenai pencantuman nama di iklan, pendekatan pengawasan yang masih berbasis aduan, keterbatasan infrastruktur, pragmatisme masyarakat, serta kuatnya budaya penyelesaian masalah berbasis *welas asih*. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi agar adanya penyusunan regulasi teknis bagi platform jasa legalitas, penyelenggaraan bimbingan teknis literasi digital bagi organ pengawas, serta peningkatan penyuluhan hukum untuk masyarakat.

Kata Kunci: Pengawasan; Kode Etik Notaris; Kerja Sama.

ABSTRACT

Technological advancements have given rise to the phenomenon of service agency advertising that offers business entity establishment services through collaboration with Notaries. The purpose of this research is to analyze the ethical implications of this practice and the effectiveness of its supervision. The issues discussed in this study are the advertising practices of business establishment service agencies collaborating with Notaries reviewed from the Notary Code of Ethics, as well as the effectiveness of the supervision by the Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah/MPD) and the Regional Honorary Council (Dewan Kehormatan Daerah/DKD) regarding such practices. This research is a non-doctrinal study employing an evaluative socio-legal approach to examine the gap between positive legal norms and realities in the field.The research results indicate that this practice creates juridical problems because the Notary, as a public official, becomes subordinate to a third party. In several advertisements, there are promises from service agencies regarding a specific processing time for establishing a business entity. This promise of processing speed from the service agency can be suspected as a covert form of promoting the Notary's performance. The Notary's involvement in this scheme substantially violates the prohibition of intermediary collaboration and exploits the loophole of the advertising prohibition within the Notary Code of Ethics. Furthermore, this also has the potential to compromise independence, the precautionary principle, and the formal procedures of the Law on Notary Position (UUJN), such as the signing of deeds outside the working jurisdiction. Supervision of this practice by both the MPD and DKD remains sub optimal due to regulatory loopholes regarding the inclusion of names in advertisements, a supervision approach that is still complaint-based, limited cyber infrastructure, community pragmatism, and a strong culture of compassion-based resolution. Therefore, this research recommends the formulation of technical regulations for legal service platforms, the implementation of technical guidance on digital literacy for supervisory organs, and the enhancement of legal education for the public.

Keywords: Supervision; Notary Code of Ethics; Collaboration.